

Analisis Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Banjarmasin

Husnul Abdi¹, Siti Rusidah², Hasanur Arifin²

3. Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Bisnis, Fisip Unlam Banjarmasin

4. Dosen Magister Ilmu Administrasi Bisnis, Fisip Unlam Banjarmasin

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123

Telp./Fax (0511) 3304595, 3304968

ABSTRACT

This research is aimed at finding out to what extent the regional revenue and expenditure governance reaches the level of economic, efficiency and affectivity values. Besides that, it also examines the policies conducted in order to use and optimize local revenues collection. Using descriptive method related to "value for money" concepts, this research took place in Banjarmasin city and utilized primary dan secondary data of 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011. Primary data were collected from interviews with the Head Banjarmasin Municipal Revenue Agency Office and Head of budgeting departement, while secondary data were collected from budget realization report documents. The method of economic, efficiency dan affectivity analysis was operated to measure the achievement in several relevant performance indicators. The economic level of the governance during 2007-2011 reached 84,50 %, in average, while the efficiency level reached 95,24 % and the affectivity level reached 102,81 %.

In optimizing local revenue collection, the ratio in value for money tool was useful in providing information to improve all regional government components performance, internally as well as externally.

Keywords : Value For Money, Revenue, Expenditure, economic, efficiency, affectivity

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah, pada prinsipnya adalah mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang lebih mendekati pada fungsi pelayanan kepada masyarakat, dan kemandirian untuk mengembangkan daerah. Perubahan mendasar terbitnya Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah tentu akan membawa konsekuensi pada daerah yang bersangkutan untuk melakukan penataan keuangan di daerah dalam rangka aspek penyelenggaraan Negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan keutuhan daerah.

Tujuan pokok pengaturan perimbangan keuangan adalah memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah secara proporsional, adil, rasional, akuntabel, dan transparan, mewujudkan sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah

menjadi acuan dalam alokasi penerimaan daerah dan menjadi pedoman pokok keuangan daerah. (Widjaja: 2005; 73).

Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai salah satu daerah otonom mempunyai sumber keuangan daerah yang berasal dari pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan ini harus dikelola secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pendapatan tersebut merupakan sumber dana atau pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah. Untuk belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, pengeluaran harus dikelola secara ekonomis agar dapat memenuhi kepentingan masyarakat

Dengan memperhatikan keadaan pemerintah daerah, maka penulis merasa tertarik untuk mengemukakan masalah dalam menganalisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Semua masalah inilah yang menjadi latar belakang penulisan tesis sehingga penulis mencoba mengambil judul "ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN".

2. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dilihat dari tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada Pemerintah Kota Banjarmasin dari Tahun Anggaran 2007- 2011.

3. Tinjauan Pustaka

Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan pada besarnya alokasi dana dalam APBD. Menurut Halim (2010:30) APBD merupakan rencana kegiatan pemda yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Mengingat pentingnya ekonomis, efisiensi, dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah, maka penting untuk mengedepankan dan memperhatikan kebijakan pengalokasian dana pelayanan publik tersebut. Oleh karena itu, menurut Halim dalam PAU-UGM (2010:142) dalam penyusunan anggaran tidak lagi didasarkan pada prinsip incremental, namun harus berorientasi kepada kinerja, sehingga setiap pengalokasian anggaran yang akan dikeluarkan dapat selalu dipertanggungjawabkan kepada publik. Maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai tujuan otonomi daerah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: a), pendapatan daerah; b). belanja daerah; dan c). pembiayaan daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No, 58 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Secara umum struktur anggaran pemerintah dapat disusun dengan dua pilihan struktur atau klasifikasi, yaitu klasifikasi ekonomis dan klasifikasi fungsional. Klasifikasi ekonomis dibuat berdasarkan jenis-jenis belanja yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pelayanan publik, sedangkan klasifikasi fungsional menyediakan informasi berdasarkan tujuan atau fungsi yang dijalankan oleh pemerintah (Dedi Nurdiawan dkk, 2011:32)

a. Pendapatan Daerah

Menurut Pasal 1 butir 26 Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 1 butir 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa "Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih".

Kemudian menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 bahwa pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diproleh pembayarannya

kembali oleh daerah, (Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2010:48). Menurut Slamet (2004:17) belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban yang akan menjadi pengeluaran kas daerah dalam satu tahun anggaran.

Penggunaan anggaran belanja daerah adalah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Di antara kedua urusan pemerintahan daerah tersebut, urusan wajib menjadi prioritas untuk dilaksanakan, yaitu agar kualitas hidup masyarakat daerah dapat terus ditingkatkan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, terutama untuk urusan wajib pemerintahan daerah.

Menurut Halim (2002 : 52) definisi atau pengertian Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Konsep *Value for Money*

Menurut Halim dalam PAU- UGM (2010:142) penyusunan anggaran tidak lagi didasarkan pada prinsip incremental, namun harus berorientasi kepada kinerja, sehingga setiap pengalokasian anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dinilai baik jika dapat mencapai tujuan yang ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah dalam pengelolaan APBD. Maka dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat, pertanggungjawaban mencakup mengenai pelaksanaan Value for money, yaitu ekonomi (hemat cermat), efisien (berdaya guna), serta efektif (berhasil guna). Menurut Mardiasmo

(2002:132) ketiga pokok bahasan dalam value for money sangat terkait satu dengan yang lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan (input), efisiensi membahas masukan (input) dan keluaran (output), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (output) dan dampak (outcome).

- a. Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya operasi untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa persentase tingkat pencapaian. Untuk mengukur tingkat ekonomi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara anggaran belanja dengan realisasinya dengan persentase tingkat pencapaiannya, (Mahsun, 2009:188).
- b. Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*method operation*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Input merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan output merupakan realisasi dari penerimaan daerah. (Mahsun, 2009:189).
- c. Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *output* dan *outcome*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan, Untuk mengukur tingkat efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran pendapatan

dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya (Mahsun, 2009:191)

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif. Maleong (2004:131).

Adapun Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2005:54) bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Untuk menganalisis data dilakukan dengan acuan menurut Mahsun (2009:186) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pengukuran *value for money* sesuai

a. Tingkat ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Adapun rumus untuk mengukur tingkat ekonomis adalah

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi pengeluaran}}{\text{Anggaran pengeluaran}} \times 100\%$$

b. Tingkat efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Adapun rumus untuk mengukur tingkat efisiensi adalah

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100\%$$

c. Tingkat efektivitas

Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan. Adapun rumus untuk mengukur tingkat Efektivitas adalah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

5. Hasil Dan Pembahasan

A. ANALISIS

1. Tingkat Ekonomis

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Keterangan Tk. Ekonomis
2007	698.955.289.117,00	487.549.498.918,00	69,75	Ekonomis
2008	809.414.847.500,00	683.105.049.616,16	84,39	Ekonomis
2009	870.514.611.000,00	781.131.611.957,03	89,73	Ekonomis
2010	926.510.394.130,00	822.057.278.680,40	88,73	Ekonomis
2011	982.349.854.000,00	883.218.552.334,50	89,91	Ekonomis

Sesuai perhitungan dengan perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja pada tabel tersebut untuk Tahun Anggaran 2007 - 2011 dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menggunakan konsep ekonomis dengan rata-rata 84,50 %

2. Tingkat Efisiensi

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Keterangan Tk. Ekonomis
2007	487.549.498.918,00	589.833.805.108,36	82,66	Efisien
2008	683.105.049.616,16	695.830.803.814,00	98,18	Efisien
2009	781.131.611.957,03	771.465.513.907,38	101,26	Tidak Efisien
2010	822.057.278.680,00	826.295.439.727,52	99,49	Efisien
2011	883.218.552.334,00	933.376.048.906,55	94,63	Efisien

Sesuai perhitungan dengan perbandingan antara realisasi belanja dan realisasi pendapatan pada tabel tersebut untuk Tahun Anggaran 2007 - 2011 dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menggunakan konsep efisien dengan rata-rata 95,24 %

3. Tingkat Efektivitas

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%	Keterangan Tk. Ekonomis
2007	567.928.430.000,00	589.833.805.108,36	103,86	efektif
2008	669.604.470.000,00	695.830.803.814,00	103,91	efektif
2009	727.904.836.000,00	771.465.513.907,38	105,98	efektif
2010	827.343.255.800,00	826.295.439.727,52	99,87	Tidak efektif
2011	929.039.352.000,00	933.376.048.906,55	100,47	efektif

Sesuai perhitungan dengan perbandingan antara anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada tabel tersebut untuk Tahun Anggaran 2007 - 2011 dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menggunakan konsep efektif dengan rata-rata 102,81 %.

B. PEMBAHASAN

1. Ekonomis

Pengukuran tingkat belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang merupakan pengukuran tingkat kuantitatif, dimana penekanan keberhasilan diukur dari kemampuan menyerap input yang tersedia. Untuk setiap tahunnya jumlah anggaran belanja daerah selalu terjadi kenaikan, dan pemerintah daerah dituntut kemampuannya menggunakan input (dana) yang tersedia agar terserap dan digunakan secara ekonomis.

Berdasarkan realisasi belanja atau pengeluaran dari tahun 2007 – 2011 berada dalam tingkatan ekonomis atau dibawah 100% Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Banjarmasin sudah baik, karena rasio ekonomis rata-rata kurang dari 100%. Hanya pada tahun anggaran 2008,2009 dan 2011 pengelolaan belanja langsung terdapat satu pos belanja pada posisi ekonomis berimbang yaitu belanja bunga (100%).

2. Efisiensi

Pengukuran efisiensi tersebut pada TA.2007,2008,2010 dan 2011 memberikan indikasi bahwa pemerintah Kota Banjarmasin telah menunjukkan kinerja optimal dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah, sedangkan TA 2009 belum

efisien dalam mengelola pendapatan dan belanja karena realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan , hal tersebut disebabkan penambahan anggaran belanja untuk belanja peningkatan volume kegiatan berupa belanja modal, untuk menutupi kekurangan tersebut (defisit) diambil dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.

3. Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Kota Banjarmasin dari hasil perhitungan berada pada kisaran di atas 100%. Hal ini berarti pengelolaan pendapatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin dikategorikan efektif. Begitu juga rasio pengelolaan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil yang semakin baik untuk setiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2010 tidak mencapai rasio efektivitas tidak tercapainya target penerimaan hal tersebut disebabkan penerimaan pajak daerah tidak mencapai 100 %

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan belanja Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2007 – 2011 berada pada tingkat ekonomis dengan rata-rata 84,50 %
2. Pemerintah Kota Banjarmasin sudah efisien dalam mengelola belanja daerah untuk memperoleh pendapatan daerah dari Tahun Anggaran 2007 – 2011 dengan rata sebesar 95,24 %
3. Pemerintah Kota Banjarmasin dari Tahun 2007 – 2011 sudah termasuk dalam

- kategori efektif dalam mengelola pendapatan dengan rata-rata 102,81 %.
4. Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, agar mandiri, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat/propinsi.
 5. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah dengan memperbaiki sistem administrasi pelayanan perpajakan daerah, memberi himbauan kepada wajib pajak untuk segera membayar pajak dan retribusi

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi 1987, *Prosedur Penelitian*, Rosda Karya, Jakarta
- _____, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, BPF, Yogyakarta
- _____, 2009, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bana, Yahya M, 2001, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur*.
- Darise, Nurlan, 2010, *Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD*, Indeks, Jakarta.
- _____, 2011, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, PT. Indeks, Jakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey dan Roy Kelly, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, (terjemahan oleh Masri Maris), UI-Press, Jakarta.
- Ditama Binbangkum, Sie Analisis Keuangan , *Dana Alokasi Khusus Dalam Perimbangan Pusat Dan Daerah*, denpasar.bpk.go.id.
- Halim, Abdul, 2004, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2010, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2010, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan daerah)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Karya Satya Azhar, MHD, 2008, *Analisis Kerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*, Medan, Sumatera Utara
- Lexy J Moleong 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Magister Administrasi Bisnis, 2012 , *Pedoman Penulisan Tesis*, FISIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Mahsun, M, 2009, *Pengukuran, Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, BPPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan, edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta
- _____, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Moh. Nazir. Ph. D, 2003, *Metode Penelitian* Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Medi, Setianus, 1996, *Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur*.
- Matthew B.Miles & A.Michael Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif; Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj). UI Press, Jakarta.
- Prof. Dr. S. Nasution, M.A. 2004, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah, Fokus media* Bandung.
- _____. No. 58 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net
- Slamet, Budiman, 2004, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PUSDIKLAT BPKP, Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2010, *Pengantar Keuangan Daerah, Sekolah Tinggi Akuntansi. Negara (STAN)*, Indonesia.